



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA LELANG
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 339 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penjualan barang milik daerah dalam hal tertentu dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan tanpa melalui mekanisme lelang, perlu menyusun Pedoman Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Lelang lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Lelang lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA LELANG LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
10. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Penjualan tanpa lelang adalah penjualan secara langsung barang milik daerah tertentu oleh panitia penjualan tanpa melalui proses lelang dari kantor lelang negara.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kendari selaku Pengguna Barang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang penjualan tanpa lelang atas barang milik daerah, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- (2) Penjualan barang milik daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain yaitu :
 - a. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; dan
 - b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada :
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Mantan Walikota; dan
 4. Mantan Wakil Walikota.
- (4) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Per unit.

BAB III

PRINSIP UMUM PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;

- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

BAB IV

SYARAT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah;
 - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
 - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
 - e. barang milik daerah yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (3) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. Barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

- c. Barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti hangus, dan lain-lain; atau
- d. Barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 5

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan persyaratan :

- a. Pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; dan
- b. Penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal barang yang akan dijual.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota selaku penjual.

Pasal 7

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan non lelang barang milik daerah dilakukan oleh :
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik

penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.

- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab penilai.

Pasal 8

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan tanpa lelang barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilai pemerintah atau penilai publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 10

- (1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Walikota untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG DAN PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 11

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dilakukan berdasarkan :

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Penjualan barang milik daerah pada pengelola barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain :
 - a. Data barang milik daerah;
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengelola barang.
- (2) Pengelola barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.

Pasal 14

- (1) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti :
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

- b. Tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh tim dalam berita acara penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui pengelola barang.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Walikota melalui pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan peneilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal barang yang akan dijual.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota selaku penjual.

Pasal 17

- (1) Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada Walikota.
- (2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. Tanah dan/bangunan;

- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Data barang milik daerah yang akan dijual;
 - b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah;
 - c. Nilai limit penjualan dari barang milik daerah;
 - d. Penjualan dilakukan dengan cara tanpa lelang.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengelola barang melakukan penjualan barang milik daerah tanpa lelang kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang berdasarkan akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).
- (2) Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua Pengguna Barang

Pasal 21

- (1) Penjualan barang milik daerah pada pengguna barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain :
 - a. Data barang milik daerah
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengguna barang.
- (2) Pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 22

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada penggunaan barang dilakukan berdasarkan :

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 23

- (1) Penjualan barang milik daerah pada pengguna barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain :
 - a. Data barang milik daerah;
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengelola barang.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota melalui pengelola barang disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik.

Pasal 25

- (1) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti :
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. Tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh tim dalam berita acara penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengguna Barang.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Walikota melalui pengguna barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal barang yang akan dijual.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota selaku penjual.

Pasal 28

- (1) Pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada Walikota.
- (2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. Tanah dan/bangunan;
 - b. Selain tanah dan/bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
 - c. Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Data barang milik daerah yang akan dijual;

- b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah;
- c. Nilai limit penjualan dari barang milik daerah;
- d. Penjualan dilakukan dengan cara tanpa lelang.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengguna barang melakukan penjualan barang milik daerah tanpa lelang kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang berdasarkan akta jual beli.

Pasal 31

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).
- (2) Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara Dan Mantan Pejabat Negara

Pasal 32

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah :
 - a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun :
 - 1. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
 - b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 33

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual kepada :
 - a. Pejabat negara; atau
 - b. Mantan pejabat negara.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Walikota; dan
 - b. Wakil Walikota.
- (3) Mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Mantan Walikota; dan
 - b. Mantan Wakil Walikota.

Pasal 34

- (1) Pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara; dan
 - b. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi berbeda.

Pasal 35

- (1) Pejabat negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan pejabat negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 36

- (1) Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki masa kerja atau pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara;
 - c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 37

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada mantan pejabat negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pejabat negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

- (2) Mantan pejabat negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pengguna barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara yang dilakukan tanpa lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
 - b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 39

- (1) Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara dilakukan dengan pembayaran sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus.
- (3) Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lunas dibayar, maka :
 - a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
 - b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
 - c. Biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pejabat negara/mantan pejabat negara; dan
 - d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 40

- (1) Pejabat negara dan mantan pejabat negara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh pejabat negara/mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 42

- (1) Pejabat negara yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat negara tersebut masih aktif sebagai pejabat negara secara berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa lelang diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh :
 - a. Pejabat negara, pada tahun terakhir periode jabatan pejabat negara;
 - b. Mantan pejabat negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh :
 - a. Pejabat negara kepada pengguna barang; dan
 - b. Mantan pejabat negara kepada Walikota;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. Data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir, dan
 - b. Alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 44

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat negara/mantan pejabat negara, antara lain :
 - a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi pejabat negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan pejabat negara;
 - b. Fotokopi kartu identitas;
 - c. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi pejabat negara;
 - d. Dalam hal pejabat negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi pejabat negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas pada saat yang bersangkutan menjadi pejabat negara bagi mantan pejabat negara; dan
- f. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), pengguna barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain :
 - a. Data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan penjualan kepada Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai :
 - a. Fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
 - d. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
 - e. Surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Walikota melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota membentuk tim untuk :
 - a. Melakukan penelitian alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
 - b. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui pengelola barang.
- (6) Walikota melalui pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 46

- (1) Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (5) dan ayat (7) kepada Walikota sesuai batas kewenangannya.

- (2) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. Data kendaraan perorangan dinas;
 - b. Nilai perolehan;
 - c. Nilai buku;
 - d. Harga jual kendaraan perorangan dinas;
 - e. Rincian biaya telah dikeluarkan pemerintah kabupaten untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk pejabat negara.
- (4) Dalam hal Walikota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas Walikota memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui pengelola barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara/mantan pejabat negara.

Pasal 47

- (1) Pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan, terdiri dari :
 - a. Pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Mantan pejabat negara melakukan pembayaran ke kas umum daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Serah terima barang dilakukan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari pengelola barang/pengguna barang.
- (4) Pengelola barang/pengelola barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola barang dan pengguna barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Penjualan Rumah Negara Golongan III

Pasal 48

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh pengelola barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disetujui, maka Walikota menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III.
- (4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disertai alasannya.

Pasal 49

- (1) Pengajuan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dilakukan oleh pengguna barang rumah negara golongan III kepada Walikota, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen :
 - a. Surat pernyataan dari pengguna barang rumah negara golongan III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;
 - b. Keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
 - c. Persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - d. Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;
 - e. Gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan
 - f. Surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari penggunaan barang rumah negara golongan III.
- (2) Pengguna barang milik negara golongan III bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Walikota.

- (3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Penghuni rumah negara golongan 3 dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat surat izin penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari Pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan Walikota.

Pasal 51

- (1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada penggunaan barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan :
 1. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 1. Menerima pensiun dari negara;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan :
 1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara, yang :
 - a) Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :
 1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara :
 1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud apada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
 - (3) Apabila pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Pemerintah Daerah.
 - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III kepada Walikota.
 - (5) Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Walikota atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Walikota dapat membentuk tim.
 - (7) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III.

Pasal 52

Walikota melalui pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota dengan ketentuan penilaian Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 53

- (1) Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (7).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan Keputusan Walikota.

- (3) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan salinan Keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberitahukan kepada pengguna barang rumah negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada penghuni rumah negara golongan III.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Walikota menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 55

- (1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Walikota menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke kas umum daerah melalui bendahara penerimaan.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari harga rumah negara golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 56

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh :
 - a. Penyerahan hak milik rumah; dan
 - b. Pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Walikota menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar barang milik daerah.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA LELANG

Bagian Kesatu

Proses Penjualan

Pasal 57

- (1) Penjualan barang milik daerah tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) milik daerah dapat dilaksanakan melalui proses penjualan oleh panitia penjualan.
- (2) Panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, elektabilitas, kompetisi dan akuntabel.
- (4) Proses penjualan diumumkan melalui papan pengumuman pada perangkat daerah yang membidangi aset.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti minimal 1 (satu) peserta/peminat.
- (6) Penetapan pemenang penjualan dilakukan oleh panitia penjualan.

Pasal 58

- (1) Pihak yang dapat menjadi peserta penjualan adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fotocopy akta pendirian dan perubahannya (jika ada perubahan) bagi peserta yang berbadan usaha;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi peserta perorangan;
 - c. Mengajukan permohonan kepada panitia penjualan;
 - d. Menyerahkan jaminan permohonan minimal 20% dari nilai limit harga jual yang telah ditentukan kepada panitia penjualan; dan
 - e. Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada panitia penjualan.
- (3) Jaminan permohonan akan dikembalikan kepada peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk penawar yang tidak ditetapkan sebagai calon pemenang, maka jaminan dikembalikan oleh panitia penjualan kepada peserta setelah pengumuman pemenang; atau
- b. Untuk penawar yang ditetapkan sebagai calon pemenang, jaminan permohonan dikembalikan setelah pekerjaan selesai.

Bagian Kedua Penjualan Gagal

Pasal 59

Panitia penjualan menyatakan penjualan gagal apabila :

- a. Tidak ada peserta yang mendaftar
- b. Tidak terdapat peserta yang memenuhi persyaratan
- c. Semua penawaran dibawah harga yang ditetapkan; atau
- d. Pemenang nomor urut 1 (satu) mundur dan tidak ada penggantinya

Bagian Ketiga Penjualan Ulang

Pasal 60

- (1) Dalam hal penjualan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, maka dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, pengelola barang menindaklanjuti dengan penjualan penunjukan langsung, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Bagian Keempat Pengunduran Diri Peserta Pemenang

Pasal 61

- (1) Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, tim penjualan menunjuk penawar kedua sebagai pemenang.
- (2) Jika tidak ada pemenang ke dua atau pemenang ke dua juga mengundurkan diri, maka penjualan gagal dan dilakukan penjualan ulang.
- (3) Dalam hal peserta penjualan barang hanya satu dan mengundurkan diri, maka penjualan gagal dan dilakukan penjualan ulang oleh panitia penjualan.

**Bagian Kelima
Sanksi**

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemenang penjualan barang milik daerah mengundurkan diri maka uang jaminan permohonan akan disetor ke kas daerah
- (2) Untuk pekerjaan bongkar bangunan gedung/kantor, jika pemenang penjualan terlambat melaksanakan kegiatan pembongkaran melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai limit.
- (3) Keterlambatan melaksanakan kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pemenang penjualan telah melaksanakan pekerjaannya atau terlambat lebih 1 (satu) bulan selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga ditambah sanksi jaminan permohonan dicairkan ke kas daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

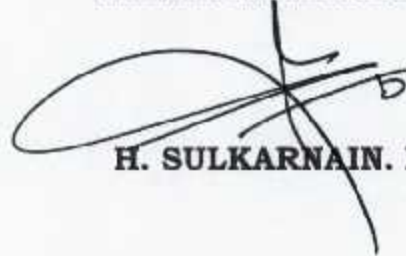
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2019

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Bat. Ka. BPKAB	
3	Kabang. Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI,


H. SULKARNAIN. KA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,


Hj. NAHWA UMAR